

LAKIP

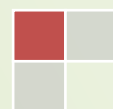
(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

TAHUN 2017



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BERAU

TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, karena berkat karunia Allah SWT maka kami dapat menyelesaikan tugas menyusun “LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2017”. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau disusun dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Sekretariat DPRD juga merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2017 sebagai bagian yang terintegrasi dalam upaya pencapaian dan perwujudan Visi Kabupaten Berau. LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2017 memuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Dalam hal ini masih adanya keterbatasan untuk memahami indikator capaian kinerja, analisis data dan sumber daya yang dimiliki, yang pada gilirannya pelaporan ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut. Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tanjung Redeb, 20 Maret 2018
Sekretaris Dewan,

Drs. H. Syahardin, MM
NIP. 195809171993091001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan pemerintah yang bersih (*clean government*) sebagaimana yang diamanatkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dimana keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara, untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan. Sehubungan dengan beberapa ketentuan tersebut diatas, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau sebagai satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun yang merupakan laporan atas pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kegiatan serta tingkat kinerja yang telah dicapai pada tahun 2017.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, maka pada tahun 2017 ada 3 (tiga) sasaran yang harus dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Berau. Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2017, dengan 6 (enam) program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan. Untuk melaksanakan program dan kegiatan serta kebijakan dalam rangka mencapai sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2017, didukung sejumlah sumber daya berupa (a) Dana, dukungan anggaran sebesar Rp. 41.163.413.630,- yang terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.188.897.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 34.974.516.630,-. (b) Sumber Daya Manusia, dukungan aparatur berjumlah 95 orang pegawai dengan status 63 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 32 orang non PNS. (c) Sarana dan Prasarana.

Disamping adanya faktor pendukung diatas, terdapat kendala-kendala yang dihadapi diantaranya masih ada sumber daya aparatur yang belum memiliki wawasan yang memadai, sebagai akibat peraturan yang sering berubah-ubah, masih adanya intervensi

pihak luar serta masih dirasakan terbatasnya sarana prasarana perkantoran. Namun demikian dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan serta koordinasi dan kerja sama tim yang solid, permasalahan-permasalahan tersebut tidak menjadi hambatan, kemudian sebagai langkah-langkah antisipasi pada kegiatan mendatang maka perlu dilakukan penambahan jumlah pegawai dan perlunya peningkatan kompetensi pejabat struktural dan staf, serta penambahan sarana dan prasarana pendukung.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Dasar Pembentukan SKPD	11
B. Tugas, Pokok dan Fungsi	21
C. Data SDM	2
D. Data Sarana Dan Prasarana	4
E. Isu Strategis Organisasi	8
BAB II PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis (RENSTRA)	10
B. Perencanaan Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran	25
BAB IV PENUTUP	29
 LAMPIRAN - LAMPIRAN	
Indikator Kinerja Utama	
Lampiran Perjanjian Kinerja	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Berau yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Berau. Dasar Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau adalah Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Bupati Berau melalui Sekretaris Daerah dan merupakan unsur pelayanan terhadap Pimpinan DPRD serta anggotanya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Berau Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan :
 - 2.1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - 2.2. Sub Bagian Rumah Tangga
 - 2.3. Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan
3. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - 3.1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
 - 3.2. Sub Bagian Pelaporan
 - 3.3. Sub Bagian Akuntansi
4. Bagian Rapat dan Persidangan, membawahkan :
 - 4.1. Sub Bagian Rapat dan Risalah
 - 4.2. Sub Bagian Perumusan Produk Hukum
 - 4.3. Sub Bagian Humas dan Protokol
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut sekretariat DPRD kabupaten Berau mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

C. Data Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Per 31 Desember 2017, memiliki sumber daya manusia sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang pejabat struktural dan 50 (lima puluh) orang pegawai non struktural dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

Tabel. 1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Berau

No.	Uraian	TINGKAT PENDIDIKAN							Jumlah
		S3	S2	S1	D III	SLTA	SLTP	SD	
1	Struktur ESELON								
	1. Eselon II	-	1	-	-	-	-	-	1
	2. Eselon III	-	-	3	-	-	-	-	3
	3. Eselon IV	-	2	4	1	2	-	-	9
	Sub Jumlah	-	3	9	-	1	-	-	13
2	Pegawai Negeri								
	a. Gol IV								
	• IV/a	-	1	-	-	-	-	-	1
	• IV/b	-	-	3	-	-	-	-	3
	• IV/c	-	1	-	-	-	-	-	1
	b. Gol III								
	• III/a	-	-	3	2	4	-	-	9
	• III/b	-	-	7	-	1	-	-	8
	• III/c	-	1	3	1	-	-	-	5
	• III/d	-	-	2	1	2	-	-	5
	c. Gol II								
	• II/a	-	-	-	-	-	-	1	1
	• II/b	-	-	-	-	6	-	-	6
	• II/c	-	-	-	-	19	-	-	19
	• II/d	-	-	-	1	2	-	-	3
	d. Gol I								
	• I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
	• I/b	-	-	-	-	-	-	-	-
	• I/c	-	-	-	-	-	-	2	2
	• I/d	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	-	3	18	5	34	-	3	63
3.	PTT / Honor	-	-	-	-	32	-	-	32
	Sub Jumlah	-	-	-	-	32	-	-	32
	Jumlah (2+3)	-	3	18	5	66	-	3	95

D. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka Melaksanakan tugas pokok dan Fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BERAU PRASARANA PENDUKUNG KEGIATAN TAHUN 2017			
No.	Nama Barang	Jumlah	Lokasi
1	Tanah		
	- Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	1	Jl. Milono Tanjung Redeb
	- Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	3	Jl. Ramania Tanjung Redeb
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Jl. Gatot Subroto Ke. Sei Bedungun Tanjung Redeb
2	Bangunan Gedung		
	- Bangunan gedung kantor permanen	3	Jl. Gatot Subroto Ke. Sei Bedungun Tanjung Redeb
	- Bangunan gudang tertutup permanen	1	Jl. Gatot Subroto Ke. Sei Bedungun Tanjung Redeb
	- Bangunan gudang terbuka semi permanen	1	Jl. Gatot Subroto Ke. Sei Bedungun Tanjung Redeb
	- Bangunan gedung tempat ibadah permanen	1	Jl. Gatot Subroto Ke. Sei Bedungun Tanjung Redeb
	- Bangunan tempat ibadah Lain-lain	1	Jl. Gatot Subroto Ke. Sei Bedungun Tanjung Redeb
	- Bangunan gedung olahraga tertutup permanen	2	Jl. Gatot Subroto Ke. Sei Bedungun Tanjung Redeb
	- Gedung pos jaga permanen	2	Jl. Ramania dan Gatot Subroto Ke. Sei Bedungun Tanjung Redeb
	- Gedung garasi/pool permanen	1	Jl. Gatot Subroto Ke. Sei Bedungun Tanjung Redeb
	- Gedung garasi/pool semi permanen	1	Jl. Milono Tanjung Redeb
	- Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen	1	Jl. Gatot Subroto Ke. Sei Bedungun Tanjung Redeb
	- Bangunan tempat kerja lain-lain	8	Jl. Gatot Subroto Ke. Sei Bedungun Tanjung Redeb
	- Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	5	Jl. Milono dan Jl. Ramania Tanjung Redeb
3	Bangunan Air/Irigasi		
	- Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain	2	Jl. Milono Tanjung Redeb
4	Instalasi		
	- Gardu Listrik Kapasitas Kecil	3	Jl. Gatot Subroto Ke. Sei Bedungun Tanjung Redeb
5	Jaringan		
	- Jaringan telp di atas tanah (Jaringan Internet)	1	Jl. Gatot Subroto Ke. Sei Bedungun Tanjung Redeb
	- Jaringan telp di atas tanah (Jaringan Radio)	1	Jl. Gatot Subroto Ke. Sei Bedungun Tanjung Redeb

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BERAU SARANA PENDUKUNG KEGIATAN TAHUN 2017			
No.	Nama Barang	Jumlah	Lokasi
I	Alat-Alat Besar		
	1. Pompa Lain-Lain	5	
II	Alat-Alat Angkutan		
	1. Mini bus	40	
	2. Pick up	0	
	3. Kendaraan bermotor angkutan barang lain-lain	2	
	4. Sepeda Motor	47	
	5. Gerobak Dorong	1	
	6. Gerobak Tarik	2	
III	Alat Bengkel dan Alat Ukur		
	1. Perkakas kontruksi logam lain-lain	7	
	2. Air Blower	4	
	3. Bak air	0	
IV	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	1. Mesin ketik manual	4	
	2. Mesin Calculator	25	
	3. Mesin penghitung uang	2	
	4. Mesin fotocopy	2	
	5. Filling Besi	2	
	6. Peti Uang	2	
	7. Lemari sorok	1	
	8. Lemari kaca	11	
	9. Lemari makan	2	
	10. Lemari kayu	5	
	11. Papan visual	4	
	12. Papan pengumuman	0	
	13. Papan tulis	0	
	14. Papan absen	0	
	15. Peta	0	
	16. Overhead proyektor	8	
	17. Alat kantor lainnya	19	
	18. Meja Kayu/rotan	2	
	19. Kursi besi/metal	0	
	20. Kursi kayu/rotan/bambu	91	
	21. Tempat tidur kayu	1	
	22. Meja tulis	0	
	23. Meja makan	38	
	24. Meja telpon	0	
	25. Meja podium	3	
	26. Meja reseption	5	
	27. Meja tambahan	19	
	28. Meja panjang	55	
	29. Meja bundar	6	
	30. Kursi rapat	511	
	31. Kursi tamu	13	
	32. Kursi tangan	4	
	33. Kursi putar	5	
	34. Kursi biasa	0	
	35. Kursi lipat	480	
	36. Bangku injak	0	
	37. Meja komputer	9	

No.	Nama Barang	Jumlah	Lokasi
IV	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	38. Tikar	1	
	39. Meja biro	31	
	40. Sofa	27	
	41. Lemari pakaian	8	
	42. Lemari rias	2	
	43. Kursi plastik	259	
	44. Meja kecil	4	
	45. Jam mekanis	2	
	46. Meja Prasmanan	1	
	47. Mesin penghisap debu	0	
	48. Mesin potong rumput	2	
	49. Mesin cuci	3	
	50. Alat pembersih lain-lain	0	
	51. Gordyn	3	
	52. Lemari es	27	
	53. Ac sentral	19	
	54. Ac split	71	
	55. Kipas angin	5	
	56. Kompos gas	8	
	57. Kompor minyak	1	
	58. Alat dapur lain-lain	12	
	59. Tabung gas	4	
	60. Radio	0	
	61. Televisi	40	
	62. Lambang garuda pancasila	24	
	63. Tiang bendera	50	
	64. Kaca Hias	1	
	65. Setrika/Uap	3	
	66. Tangga alumunium	1	
	67. Dispenser	15	
	68. Mimbar/podium	2	
	69. Palu sidang	1	
	70. Alat rumah tangga lain-lain	260	
	71. Spring bed	13	
	72. Karpet	27	
	73. Alat pembantu pemadam kebakaran	1	
	74. Mainframe	2	
	75. Local Area Network (LAN)	34	
	76. PC unit	57	
	77. Laptop	9	
	78. Notebook	50	
	79. Floppy disk unit	0	
	80. Hard disk	6	
	81. Storage modul unit	1	
	82. Printer	64	
	83. Peralatan mini komputer	6	
	84. Scanner	4	
	85. CPU	0	
	86. Monitor	12	
	87. Keyboard	5	
	88. Peralatan personal komputer lain-lain	53	
	89. Hardisk eksternal	38	
	90. Mini Display VGA Adapter	2	
	91. Server	1	

No.	Nama Barang	Jumlah	Lokasi
IV	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	92. Router	3	
	93. Peralatan jaringan lainnya	6	
	94. Meja Kerja Ketua/wakil ketua DPRD	6	
	95. Meja kerja pejabat eselon II	1	
	96. Generator ginset	3	
	97. Mesin Penghancur Kertas	9	
	98. Meja kerja pejabat eselon III	5	
	99. Meja kerja	19	
	100. Meja operator	0	
	101. Kursi kerja ketua/wakil ketua DPRD	0	
	102. Kursi kerja pejabat eselon II	4	
	103. Kursi kerja pejabat eselon III	0	
	104. Kursi kerja pejabat eselon IV	0	
	105. Kursi kerja pejabat	17	
	106. Kursi rapat pejabat eselon II	15	
	107. Kursi hadap depan meja kerja ketua/wakil ketua	5	
	108. Kursi tamu di ruangan ketua/wakil ketua DPRD	3	
	109. Lemari buku untuk perpustakaan	2	
	110. Lemari arsip untuk arsip dinamis	49	
	111. Buffet kayu	11	
	112. Lemari dan arsip pejabat	5	
	113. Meja Prasmanan	1	
V	Alat studio dan alat Komunikasi		
	1. Amplifier	3	
	2. Loudspeaker	24	
	3. Wireless	5	
	4. Microphone	7	
	5. Mic conference	120	
	6. Stabilisator	6	
	7. Camera video	17	
	8. Handy cam	2	
	9. Audio mbding console	1	
	10. Compact disc player	2	
	11. Power supply microphone	2	
	12. Unintemuptible power supply (UPS)	32	
	13. Power amplifier	8	
	14. Audio tape reel recorder	3	
	15. Peralatan studio visual lain-lain	44	
	16. Rak Peralatan	7	
	17. Tripod camera	1	
	18. Camera Film	7	
	19. Photo tustel	0	
	20. Head set	1	
	21. Amplifier	3	
	22. Sound system	6	
	23. Pesawat Telephone	21	
	24. Handy talky	6	
	25. Facsimile	0	
	26. Wireless amplifier	5	
	27. Peralatan antena UHF	11	
	28. Audio Processor	2	
	29. Organ/electone	3	
	30. Equalizer	2	

	31. Kabel Roll 32. Mixer 33. Handy Cam 34. Karpet Ambal	6 3 1 22	
VI	Alat Laboratorium		
	1. Kaca hias 2. Aquarium 3. Blender	1 0 3	
No.	Nama Barang	Jumlah	Lokasi
	4. Rice cooker 5. Alat Pemadam kebakaran 6. Gambar presiden 7. Gambar wakil presiden 8. Tape recorder	7 32 25 25 16	
VII	Buku dan Perpustakaan		
	1. Ilmu Pengetahuan Umum 2. Agama Islam 3. Hukum 4. Fotografi, sinematografi 5. Berkas Komputer Lainnya 6. Alat Tenis (Meja Meja Tenis) 7. Alat-alat Olahraga (Tread Mill) 8. Alat Olah Raga	71 100 268 4 13 5 1 3	

E. Isu Strategis Organisasi

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain :

1. Dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal masih dirasakan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.
2. Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah pusat sehingga perlunya sosialisasi kepada semua pihak terkait agar tidak menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dan tertib administrasi.
3. Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah ditetapkan.
4. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat DPRD dan anggota DPRD terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang digunakan.
5. Keterlambatan materi Raperda dan dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.

6. Banyak kegiatan yang terfokus di akhir tahun anggaran menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
7. Terkadang terjadi hubungan yang kurang harmonis antara eksekutif dan legislatif.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

Sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 merupakan salah satu OPD pelaksana Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu : “Menciptakan tata Pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel” dengan tujuan RPJMD “Mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan, profesional dan akuntabel”.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari misi dan tujuan, Sekretariat DPRD Kabupaten Berau merumuskan tujuan, sasaran dan cara mencapainya melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

- Tujuan : 1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Berau yang profesional.
2. Meningkatnya sarana penunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.
3. Meningkatnya kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif yang aspiratif, transparan dan akuntabel.
- Sasaran : 1. Terfasilitasinya secara baik pelaksanaan kegiatan DPRD.
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan DPRD.
3. Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang optimal.
- Strategi : 1. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Berau yang profesional.
2. Penambahan SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.
3. Penyediaan sarana penunjang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dan pemeliharannya.

4. Peningkatan Kapasitas anggota DPRD tentang administrasi dan peraturan-peraturan untuk Pemerintah Daerah, serta dalam hal penyusunan program kerja Banmus.
5. Ditingkatkannya frekwensi pertemuan rapat-rapat anggota DPRD.
- Kebijakan : 1. Peningkatan kualitas SDM Sekretariat DPRD melalui Pendidikan dan Pelatihan Formal, Peningkatan Wawasan Aparatur dan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan..
2. Penambahan SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
3. Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana alat kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD.
4. Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD (melalui Bimtek/Workshop/Seminar) Peningkatan Wawasan Melalui Kunjungan Kerja ke Luar/Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri.
5. Peningkatan Frekuensi Rapat-Rapat anggota DPRD dan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama.
- Program : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat-menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional
6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
8. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
9. Penyediaan Alat Tulis Kantor
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13. Penyediaan Peralatan Tumbuh Tumbuhan
14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15. Penyediaan Makanan dan Minuman
16. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
17. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
18. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
19. Pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan/Dinas
20. Pengadaan Mebeleur
21. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
22. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
23. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan Gedung kantor
24. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
25. Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
26. Peningkatan Wawasan Aparatur Pengelola Keuangan
27. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
28. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
29. Pembahasan Rancangan peraturan Daerah
30. Hearing/Dialog dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat / Agama
31. Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan
32. Rapat-rapat Paripurna
33. Kegiatan Reses
34. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
35. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
36. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan

37. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
38. Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
39. Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD
40. Dialog/audiensi dengan Tokoh Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
41. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

Dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menyeluruh, disebabkan berbagai pengaruh baik internal, eksternal lokal, regional, maupun global, menimbulkan dampak tuntutan positif terhadap aksi dan reaksi pemerintah sebagai bentuk responsibilitas pemerintah untuk memenuhi tuntutan dan desakan kearah penyelenggaraan pemerintahan lebih baik. Responsibilitas pemerintahan terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam kebijakan-kebijakan daerah yang terintegrasi mulai dari perumusan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan, sehingga perubahan dapat terjadi secara terarah dan efektif mendorong terwujudnya Visi Kabupaten Berau yaitu **“Bersama Bangun Berau: Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing.”** Dengan proses yang teratur, terkendali, dan terkoordinasi mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan, sampai dengan pelaporan, akan memudahkan pemerintah untuk terus mengevaluasi diri dan kinerja pemerintahannya, yang pada gilirannya secara terus menerus dapat terkoreksi dan mendorong terciptanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.

B. Perencanaan Kinerja

Rencana kinerja (Performance Plan) menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau selama tahun berjalan dan mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran merupakan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian misi dan tujuan sedangkan untuk tingkat kegiatan didefinisikan untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan. Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi rencana strategik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau menetapkan target untuk

masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja baik untuk indikator tingkat sasaran maupun indikator kinerja (input, output, outcome) tingkat kegiatan.

Penetapan Kinerja 2017 adalah suatu pernyataan kinerja sasaran yang harus dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau dalam Tahun 2017 sesuai dengan APBD Tahun 2017. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah ketersediaan Sarana dan Prasarana	100%
2	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.	Jumlah Anggota DPRD Yang Mengikuti Bimtek/ Workshop/Seminar	60 ok
3	Terakomodirnya/terlaksananya konsultasi dan penyaluran aspirasi masyarakat kepada anggota DPRD	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang diselenggarakan Terserapnya aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses	30 kali 60 ok
4	Terlaksananya fungsi legislasi dan pengawasan DPRD	Jumlah Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Jumlah Kunjungan Kerja Ke Dalam Daerah	6 kali 6 kali
5	Terwujudnya kinerja lembaga legislatif yang optimal	Jumlah raperda yang ditetapkan menjadi perda Rapat Paripurna yang terselenggara Rapat Alat Kelengkapan yang terselenggara	19 perda eksekutif 5 perda inisiatif 12 kali 60 kali

Sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2017 terdapat beberapa sasaran Strategis yang ingin dicapai yaitu :

- a. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja Jumlah ketersediaan Sarana dan Prasarana yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.

- b. Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Jumlah Anggota DPRD Yang Mengikuti Bimtek/ Workshop/Seminar selama tahun anggaran 2017.

- c. Terakomodirnya/terlaksananya konsultasi dan penyaluran aspirasi masyarakat kepada anggota DPRD

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang diselenggarakan dan Terserapnya aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Berau.

- d. Terlaksananya fungsi legislasi dan pengawasan DPRD

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja Jumlah Kunjungan Kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Berau selama tahun 2017 baik Ke Luar Daerah maupun Ke Dalam Daerah.

- e. Terwujudnya kinerja lembaga legislatif yang optimal

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja Jumlah perda yang dihasilkan atau raperda yang disetujui DPRD Kabupaten Berau, Rapat Paripurna yang terselenggara dan Rapat Alat Kelengkapan yang terselenggara selama tahun 2017.

Sedangkan berdasarkan anggaran Tahun 2017 ada sebanyak 40 (empat puluh) sasaran. Sasaran dan indikator kinerja pada tingkat sasaran beserta targetnya adalah sebagai berikut :

**PENETAPAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2017**

SKPD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten : Berau, Kalimantan Timur
Tahun Anggaran : 2017

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	%	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					15.687.486.500,00
	1. Penyediaan Jasa Surat-menyerurat	Tercapainya prosentase pelayanan surat menyeruratmenyerurat		1 thn	Penyediaan Jasa Surat-menyerurat	10.720.000,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi Telpon, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bln	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	805.389.000,00
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Jasa penunjang Kegiatan / pekerjaan		3 Jenis	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.720.000,00
	4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa jaminan milik daerah		1 thn	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	158.016.000,00
	5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Peijinan Kendaraan Dinas/ Operasional		12 bln	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional	1.664.480.000,00
	6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honorarium Penunjang Kegiatan Pegawai		12 bln	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	433.171.000,00
	7. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		12 bln	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	430.264.000,00
	8. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Alat alat Kerja		12 bln	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	126.720.000,00
	9. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Penunjang Kebutuhan Kerja Sekretariat Dewan & DPRD		1 thn	Penyediaan Alat Tulis Kantor	156.720.000,00
	10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan kantor		12 bln	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	356.720.000,00
	11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penyediaan Komponen instalasi listrik		12 bln	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	86.720.000,00
	12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		1 thn	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	408.436.000,00
	13. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		12 bln	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.000.000,00
	14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		12 bln	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.408.452.000,00
	15. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya kebutuhan bahan makanan dan		1 thn	Penyediaan Makanan dan Minuman	439.672.000,00

		minuman					
	16.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya kebutuhan biaya perjalanan dinas rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		1 thn	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6.061.540.000,00
	17.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya perjalan dinas rapat rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah		1 thn	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	265.016.000,00
	18.	Penyediaan Jasa Adminstrasi /teknis perkantoran	Tersedianya kebutuhan tenaga administrasi/tehnis perkantoran		39 orang	Penyediaan Jasa Adminstrasi /teknis perkantoran	1.164.513.830,00
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						1.486.772.000,00
	1.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/Dinas	Tersedianya Penunjang Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		1 thn	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/Dinas	598.820.000,00
	2.	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor		1 thn	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	56.720.000,00
	3.	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin / berkala peralatan rumah jabatan/dinas		1 thn	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	51.720.000,00
	4.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 thn	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	126.720.000,00
	5.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya biaya rehap sedang/berat gedung kantor		3 unit	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	522.672.000,00
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						130.120.000,00
	1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas Pegawai Beserta Perlengkapannya		96 stell	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	63.820.000,00
	2.	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Tersedianya Kebutuhan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu		36 stell	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	66.300.000,00
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						41.720.000,00
	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Tersedianya bahan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD		3 Laporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	41.720.000,00
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH						18.322.754.800,00
	1.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya pendukung kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah		16 Perda	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.203.624.000,00
	2.	Hearing/dialog dan koordinasi dng pejabat pem. daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Tersedianya pendukung kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan toko masyarakat/toko agama		1 thn	Hearing/dialog dan koordinasi dng pejabat pem. daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	190.000.000,00

	3. Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	Tersedianya bahan pendukung rapat rapat alat kelengkapan dewan		1 thn	Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	4.338.826.800,00
	4. Rapat-rapat paripurna	Tersedianya bahan pendukung rapat rapat paripurna dan paripurna istimewa		1 thn	Rapat-rapat paripurna	901.000.000,00
	5. Kegiatan Reses	Tersedianya kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah		1 thn	Kegiatan Reses	2.020.592.000,00
	6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Tersedianya Kegiatan Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah		6 Kali	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	640.000.000,00
	7. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Tersedianya Bimbingan Tehnis Bagi Pimpinan Anggota DPRD		2 Kali	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	2.054.872.000,00
	8. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar Daerah	Penyerapan wawasan dan ilmu melalui kunjungan kerja ke luar daerah		6 Kali	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar Daerah	3.732.508.000,00
	9. Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD	Tersedianya kebutuhan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD		1 thn	Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD	69.720.000,00
	10. Dialog/audiensi dengan Tokoh Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan kemasyarakatan	Tersedianya belanja rumah tangga Pimpinan DPRD		1 thn	Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD	171.612.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Berau melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2017 yang telah disepakati. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Misi dan tujuan Sekretariat DPRD. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

Hasil pengukuran Pencapaian Sasaran didasarkan atas hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan dalam suatu sasaran, Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukkan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran pertama : Tersedianya sarana dan prasarana penunjang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator kinerja. Target beserta realisasi sasaran tersebut adalah :

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
Jumlah ketersediaan Sarana dan Prasarana	%	100	84,25	85%

Ketersediaan sarana dan prasarana sangatlah diperlukan guna menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD. Apabila dilihat dari realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Tahun 2017 yaitu senilai Rp. 1.142.995.900 atau 84,25% dari anggaran sebesar Rp. 1.356.652.000. Dari rencana Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang ada capaian kinerja realisasi fisik untuk Pengadaan

perlengkapan rumah jabatan/dinas mencapai 81,66 persen, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor mencapai 60,15% Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 11,41%, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor mencapai 82,85%, dan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor mencapai 97,38%,. Dengan terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2017 ditambah dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada sebelumnya diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Berau.

Sasaran Kedua : Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator kinerja. Target beserta realisasi sasaran tersebut adalah :

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1. Jumlah Anggota DPRD Yang Mengikuti Bimtek/ Workshop/ Seminar	ok	60	42	70%

Bimtek/Workshop/Seminar yang dijadwalkan untuk diikuti oleh seluruh anggota DPRD yaitu sebanyak 2 kali pelaksanaan atau 60 ok. Pada pelaksanaannya untuk Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD pada tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 2 kali, pada Bimtek pertama diikuti sebanyak 22 orang anggota dewan dan pada Bimtek yang kedua diikuti sebanyak 20 orang anggota dewan. Adanya anggota dewan yang tidak mengikuti kegiatan tersebut karena adanya kepentingan yang bersamaan pada jadwal pelaksanaan bimtek dan adanya anggota dewan yang mengalami kecelakaan menjelang hari pelaksanaan sehingga batal mengikuti jadwal acara. Sementara itu, diluar Bimtek yang sudah dijadwalkan tersebut terdapat juga Bimtek yang diikuti oleh anggota dewan yang dilaksanakan oleh Partai dan diikuti oleh anggota dewan sepanjang prosedur dan Pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.

Jika dibandingkan dengan capaian indikator sasaran pada tahun 2016 yaitu sebesar 71%, maka capaian tahun 2017 kurang lebih sama dengan tahun 2016, dimana pelaksanaan Bimtek/Workshop/Seminar untuk Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Berau pada tahun 2016 juga sebanyak 2 kali.

Sasaran Ketiga : Terakomodirnya/terlaksananya konsultasi dan penyaluran aspirasi masyarakat kepada anggota DPRD

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator kinerja. Target beserta realisasi sasaran tersebut adalah :

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1. Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang diselenggarakan	kali	30	25	83%
2. Terserapnya aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses	ok	60	56	93%

Realisasi untuk Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama diselenggarakan sebanyak 25 kali dari target pelaksanaan 30 kali atau sebesar 83%.

Capaian kinerja untuk Kegiatan Reses yaitu mencapai 93 % yaitu pada Reses I dilaksanakan sebanyak 28 ok sedangkan pada Reses II dilaksanakan sebanyak 28 ok dimana target pelaksanaan Reses untuk Tahun 2017 yaitu sebanyak 60 ok. Dengan capaian kinerja tersebut diharapkan dapat terserapnya aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses.

Jika dibandingkan dengan capaian indikator sasaran untuk Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama pada tahun 2016 yaitu sebesar 135%, maka capaian tahun 2017 mengalami penurunan dalam penyelenggaraan untuk Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama, selain itu penetapan target yang lebih tinggi pada tahun 2017 sebanyak 30 kali sedangkan pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebanyak 20 kali saja. Sedangkan capaian kinerja untuk Kegiatan Reses tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 yang prosentase pelaksanaannya hanya sebesar 45% dari target yang ditetapkan.

Sasaran Keempat : Terlaksananya fungsi legislasi dan pengawasan DPRD

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator kinerja. Target beserta realisasi sasaran tersebut adalah :

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1. Jumlah Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah	kali	6	9	150%
2. Jumlah Kunjungan Kerja Ke Dalam Daerah	kali	6	11	183%

Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah terealisasi sebesar 150% dengan target kinerja Sebanyak 6 kali kunjungan dan terealisasi sebanyak 9 kali. Besarnya jumlah realisasi untuk kegiatan ini didukung oleh Ketersediaan anggaran dan Kesiapan dewan melaksanakan kegiatan kunjungan sesuai rencana. Kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu sarana dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD.

Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam daerah pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 6 kali dan terealisasi sebanyak 11 kali. Kegiatan ini merupakan salah satu sasaran strategis guna mendorong terlaksananya fungsi legislasi dan pengawasan DPRD terhadap pembangunan dalam daerah.

Jika dibandingkan dengan capaian indikator sasaran untuk Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah pada tahun 2016 yaitu sebesar 154%, maka capaian tahun 2017 kurang lebih sama dengan capaian kinerja tahun 2016. Sedangkan capaian kinerja untuk Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam daerah pada tahun 2016 yaitu sebesar 117%, maka capaian tahun 2017 mengalami peningkatan.

Sasaran Kelima : Terwujudnya kinerja lembaga legislatif yang optimal

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator kinerja. Target beserta realisasi sasaran tersebut adalah :

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1. Jumlah perda yang dihasilkan	perda	19 perda eksekutif 5 perda inisiatif	7	29%
2. Rapat Paripurna yang terselenggara	kali	12	13	108%
3. Rapat Alat Kelengkapan yang terselenggara	kali	60	123	205%

Kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Berau menghasilkan sebanyak 7 perda dari 18 raperda eksekutif dan 5 raperda inisiatif DPRD yang disepakati.

Penyelenggaraan Rapat-rapat alat kelengkapan dapat berjalan dengan baik dan mencapai 123 kali pelaksanaan, terutama rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPRD. Sementara itu rapat-rapat paripurna juga mencapai 108% dalam realisasinya, yaitu 13 kali rapat paripurna / rapat paripurna istimewa dari target kinerja sebanyak 12 kali pelaksanaan.

Perda yang dihasilkan pada tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang menghasilkan 10 perda, demikian juga dengan rapat-rapat paripurna yang diselenggarakan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan penyelenggaraan di tahun 2016 yaitu mencapai 141% dari target kinerja yang ditetapkan. Untuk Penyelenggaraan Rapat-rapat alat kelengkapan mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 123 kali sedangkan tahun 2016 93 kali pelaksanaan.

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang ada dilingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Berau antara lain :

1. Jarak waktu Pengesahan APBD Perubahan Tahun 2017 dengan akhir tahun yang membuat penyelesaian pekerjaan untuk anggaran perubahan menjadi sempit.
2. Minimnya dana yang tersedia di anggaran Sekretariat DPRD kabupaten Berau untuk pembuatan 1 (satu) naskah akademik serta kurang dilibatkannya tim dari sekretariat DPRD untuk bekerjasama dengan tim penyusun naskah akademik tersebut.

3. Dalam hal penilaian tunjangan perumahan dan transportasi bagi anggota DPRD kabupaten Berau, sekretariat DPRD kabupaten Berau belum mendapat hasil yang maksimal atas penilaian dari pihak ketiga tersebut, karena masih berupa laporan hasil penelitian penilaian, sehingga untuk menentukan nilai atas tunjangan-tunjangan tersebut tidak ada.
4. Kompetensi dan kemampuan Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal.
5. Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah yang sering terjadi sehingga perlu memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya yang terkadang menghambat kelancaran administrasi.
6. Kurangnya tenaga atau staf di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau terutama pada bagian Keuangan yang mengakibatkan tenaga yang ada harus rangkap jabatan untuk pekerjaan yang harus dilaksanakan.
7. Keterlambatan laporan/SPJ pada beberapa kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.

Untuk mengatasi Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang ada dilingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Berau ada beberapa Solusi yang dapat dilakukan yaitu :

1. Jarak waktu Pengesahan APBD Perubahan sebaiknya lebih awal untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan terutama yang mengguna anggaran perubahan.
2. Perlunya penambahan dana untuk setiap naskah akademik, namun juga perlu mencari referensi ke daerah lain mengenai besaran dana dalam penyusunan kegiatan tersebut serta kerjasama yang baik antara tim dari sekretariat DPRD kabupaten Berau dengan tim penyusun dari pihak ketiga supaya kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai keinginan dari semua pihak dalam hal ini Anggota DPRD Kabupaten Berau.
3. Perlunya kajian atas kerjasama konsultansi pada pihak ketiga yang dapat memberikan kepastian dalam hal penelitian penilaian sehingga dapat membantu untuk mengambil sebuah keputusan.
4. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD melalui pelatihan dan pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Perlu disosialisasikannya secara cepat kepada semua pihak terkait mengenai Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah yang terjadi sehingga tidak menghambat kelancaran dan tertib administrasi.

6. Perlunya penambahan tenaga/staf di lingkungan Sekretariat DPRD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan administrasi di Sekretariat DPRD.
7. Lebih cermat lagi dalam menunjuk pejabat penatausahaan keuangan.

Berdasarkan pada hasil perhitungan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Sekretariat DPRD dalam melaksanakan pelayanan untuk Tahun Anggaran 2017 secara umum dikategorikan berhasil dengan baik.

B. Realisasi Anggaran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2017 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2017 dengan alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 sebesar Rp. 6.188.897.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 5.677.361.512,- atau 91,73%. Sedangkan Anggaran Belanja Langsung program dan kegiatan sebesar Rp. 34.974.516.630,- dan realisasinya sebesar Rp. 25.593.794.349,- atau 73,18%. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini :

1) Belanja Tidak Langsung

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai	6.188.897.000,00	5.677.361.512,00	91,73
	Jumlah	6.188.897.000,00	5.677.361.512,00	91,73

2) Belanja Langsung

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		15.123.269.830,00	12.368.149.424	81,78
1.	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	10.720.000,00	1.320.000,00	10,53
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	805.389.000,00	586.704.815,00	74,84
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.720.000,00	68.390.000,00	93,47
4.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	158.016.000,00	146.746.700,00	98,65
5.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional	1.664.480.000,00	1.011.094.000,00	48,23
6.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	433.171.000,00	251.525.400,00	67,38

7.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	430.264.000,00	393.901.000,00	87,49
8.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	126.720.000,00	122.606.500,00	64,10
9.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	156.720.000,00	155.237.650,00	98,96
10.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	356.720.000,00	347.882.950,00	90,10
11.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	86.720.000,00	62.222.000,00	99,91
12.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	408.436.000,00	366.988.375,00	91,52
13.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.000.000,00	44.748.000,00	79,45
14.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.408.452.000,00	2.057.605.000,00	86,71
15.	Penyediaan Makanan dan Minuman	439.672.000,00	266.626.700,00	37,64
16.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6.061.540.000,00	5.338.653.114,00	88,03
17.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	265.016.000,00	62.971.000,00	6,26
18.	Penyediaan Jasa Adminstrasi /teknis perkantoran	1.164.513.830,00	1.082.926.220,00	76,16

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		1.356.652.000,00	1.142.995.900,00	84,25
1.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/Dinas	598.820.000,00	488.994.000,00	81,66
2.	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	56.720.000,00	34.115.600,00	60,15
3.	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	51.720.000,00	5.899.000,00	11,41
4.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	126.720.000,00	104.990.000,00	82,85
5.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	522.672.000,00	508.997.300,00	97,38

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		130.120.000,00	125.652.000,00	96,57
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Harian	63.820.000,00	61.572.000,00	96,48
2.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	66.300.000,00	64.080.000,00	96,65

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		41.720.000,00	15.196.000,00	36,42
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	41.720.000,00	15.196.000,00	36,42

e. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		18.322.754.800,00	11.941.801.025,00	65,17
1.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.203.624.000,00	2.272.189.931,00	54,05
2.	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	190.000.000,00	109.976.500,00	57,88
3.	Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	4.338.826.800,00	3.264.914.531,00	75,25
4.	Rapat-rapat paripurna	901.000.000,00	589.671.000,00	65,45
5.	Kegiatan Reses	2.020.592.000,00	1.388.455.700,00	68,72
6.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	640.000.000,00	350.544.000,00	54,77
7.	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	2.054.872.000,00	1.182.104.184,00	57,53
8.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar Daerah	3.732.508.000,00	2.694.460.904,00	72,19
9.	Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD	69.720.000,00	2.040.000,00	2,93
10.	Dialog/audiensi dengan Tokoh - Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	171.612.000,00	87.444.275,00	50,95

3) Pencapaian Kinerja Keuangan

ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2017				
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Belanja Tidak Langsung (BTL)	6.188.897.000,00	5.677.361.512,00	91,73
II	Belanja Langsung (BL)	34.974.516.630,00	25.593.794.349,00	73,18
	Jumlah	41.163.413.630,00	31.271.155.861,00	75,97

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau terserap 91,73 %, dengan sisa dana pada Belanja Langsung Rp. 511.535.488,-. Sedangkan Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau terserap 73,18%, dengan sisa dana pada Belanja Langsung Rp. 9.380.722.281,-.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja instansi Pemerintah. LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Berau merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa akan datang.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Berau telah berhasil dengan kategori memuaskan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan sebesar 75,97% walaupun dalam pencapaian visi dan misi menghadapi berbagai tantangan dan kendala baik internal maupun eksternal. Dalam lingkup internal mencakup keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan belum optimalnya koordinasi internal dan eksternal terkait tugas dan fungsi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan memacu pelaksanaan Good Governence dan Clean Government yang melibatkan stakeholder sehingga kedepan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai bentuk dari transparansi terhadap masyarakat.

I. PENDAHULUAN

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

IV. PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN